

**KEBIJAKAN PEMERINTAH FILIPINA DALAM MENANGANI  
GERAKAN SEPARATIS MORO DI MINDANAO**

**RESUME SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**TRI SARWINI  
151070012**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA  
2011**

## **RESUME SKRIPSI**

Banyak negara di dunia ini terdapat gerakan separatis yang menuntut pemisahan diri, termasuk Filipina. Kepincangan sosial, ekonomi dan politik antara penduduk di Utara dan Selatan Filipina menjadikan perselisihan diantara keduanya. Filipina menghadapi gejolak keamanan yang tidak stabil di wilayah selatan, disebabkan etnis moro yang menginginkan pemisahan diri dari pemerintah Filipina dan ingin mendirikan negara merdeka di wilayah Mindanao Filipina bagian Selatan. Faktor yang melatar belakangi berkembangnya separatis Moro ialah: sejarah kolonial, penyatuan paksa kelompok Muslim ke dalam khatolik Filipina, penjajahan tanah air Moro dan pengambilan aset-aset kekayaan sumber daya alam tanpa bagi hasil yang adil menjadi pemicu gerakan pemisahan diri Moro dari Filipina.

Gerakan terorganisir muncul pertama kali adalah MIM pada tahun 1968 yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi umat Islam, dilanjutkan dengan MNLF dipimpin oleh Nurulhaj Musuari dilatar belakangi pada kekuatan islam yang menuntut adanya otonomi khusus di wilayah Moro Mindanao, gerakan ini dapat menarik

dukungan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI untuk membantu mereka dalam melancarkan seranganya kepada pemerintah Filipina.

Perjanjian damai dibentuk pemerintah dengan MNLF dan OKI sebagai Mediator. Sebagai hasil yang dicapai terbentuknya Tripoli Agreement yang ditandatangani 1976 dan Peace Agreement 1996. Muncul perpecahan dikalangan elit-elit pemberontak Moro yang tergabung dalam MNLF, dan melahirkan kelompok-kelompok separatis baru, seperti MILF dan Abu Sayyaf. Gerakan MILF pimpinan Salamat Hashim memiliki cita-cita mendirikan negara Islam di Filipina Selatan dengan tujuan memperoleh kembali kemerdekaan yang dirampas dan memperjuangkan penentuan nasib sendiri melalui perjuangan secara damai. Abu Sayyaf memiliki jaringan dengan organisasi teroris internasional, gerakan ini diarahkan pada orang-orang Khatolik di Filipina selatan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka.

Dalam perkembanganya pemerintah Filipina berupaya membuat kebijakan untuk mengatasi gerakan separatis Moro dengan berbagai kebijakan yaitu: *Pertama*, memberikan Otonomi khusus sebagai pelaksanaan final dari perjanjian Tripoli. Otonomi khusus Bangsa Moro merupakan hak istimewa yang diberikan pemerintah

Filipina untuk wilayah Mindanao. Otonomi tersebut meliputi pembagian wilayah yang mencakup 13 provinsi dan 9 kota, pembagian kekuasaan berupa kutipan pajak dan kewenangan untuk mengontrol sumber daya alam di Filipina bagian Selatan, dan kewenangan legislatif yang berupa pemberian wewenang kepada pemerintah lokal Moro untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri yang bertanggung jawab langsung pada presiden. *Kedua*, meningkatkan keamanan masyarakat, Moro dianggap sebagai gerakan pemberontak terhadap pemerintah yang melakukan angka kejahatan tinggi di Filipina. Dengan itu pemerintah Filipina bersiaga mempersiapkan pasukan keamanan yang bernama AFP. Penambahan dilakukan untuk menjaga kestabilan dan keamanan warga diwilayah Mindanao. Kemudian kebijakan pemerintah yang *ketiga* adalah intervensi yang berupa pemaksaan terhadap pemimpin MILF untuk dapat mengakhiri pemberontakan dan pelatihan keterampilan militer. Pemerintah akan memberi sanksi tegas terhadap setiap anggota yang ditemukan telah melakukan latihan dan terlibat melakukan tindak kekerasan terhadap warga sipil.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah menghadapi beberapa hambatan dalam menyelesaikan konflik dengan separatis Moro. Hambatan *pertama*, campur tangan dari

Libya dan OKI telah menambah dinamika konflik penyelesaian masalah dengan separatist Moro. OKI yang memiliki dasar memperjuangkan kepentingan umat islam telah mengakui MNLF sebagai bagian dari resolusi OKI dan mitra terdekat OKI. OKI mengancam akan mengembargo pasokan minyak terhadap Filipina jika tidak segera mengiyakan perintah OKI, tekanan yang diberikan OKI pada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan otonomi khusus dan juga ancaman dari OKI membuat pemerintah tidak bisa menolak permintaan tersebut mengingat ketergantungannya terhadap negara-negara pengekspor Minyak OPEC yang merupakan anggota OKI.

Hambatan yang *kedua*, adanya isu ancaman terorisme yang menyebabkan proses perdamaian tak kunjung usai. Gerakan separatist Moro MILF dan Abu Sayyaf telah bergabung dalam jaringan teroris internasional Al-Qaida dan Jamaah Islamiah(JI). Keberadaan gerakan separatist Moro di Filipina menjadikan sasaran yang nyaman karena gerakan tersebut membutuhkan banyak dukungan baik sumber daya manusia maupun sumber dana dari para donatur. Sehingga menjadi jalan yang sangat mudah bagi anggota teroris untuk masuk kedalamnya. Hubungan yang dijalin MILF dapat diketahui dari pelatihan penggunaan peluncuran granat, mortir, senjata antitank dan

howitzer. Berbagai aksi bom, pembunuhan, penculikan dan pemerasan dilakukan kelompok tersebut untuk menyerang pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut menjadikan masalah baru pada pemerintah dalam upaya penanganan penyelesaian masalah gerakan separatis Moro. Sesungguhnya MILF sadar akan keberadaan jaringan terorisme di wilayahnya namun hal itu justru menjadi keuntungan bagi MILF. MILF menggunakan kesempatan dengan masuknya Jamaah Islamiah ke wilayahnya untuk bergabung memerangi angkatan bersenjata Filipina.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang di terapkan pemerintah Filipina belum berhasil, indikator dari ketidakberhasilan pemerintah Filipina menyelesaikan Masalah gerakan separatis Moro di Mindanao adalah adanya berbagai hambatan-hambatan dalam proses perundingan sehingga masalah tersebut masih tetap ada dan gerakan separatis di Filipina masih tetap melakukan pemberontakan.